

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem menurut James A Hall (2007: 32). Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.

International Organization of Supreme Audit Institutions menyatakan bahwa pengendalian intern sebagai suatu proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menghadapi resiko-resiko, serta memberikan keyakinan yang memadai untun mencapai misi dengan mencapai tujuan-tujuan umum, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif
2. Menyajikan laporan keunagn yang akurat dan handal
3. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengamankan sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan asset.

Pengendalian intern menurut Boynton (2006: 391). Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: (1)

keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi

Warens Reeve Fees (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut.

Pengendalian intern menurut Horngren dkk (2006: 372). Pengendalian intern adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk melakukan kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan. Hal ini memiliki serangkaian tindakan yang dapat meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses pengendalian intern dan tidak perlu untuk ditambahkan kedalam infrastruktur suatu perusahaan.

Pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang terkait dan berperan misalnya dewan direksi, manajemen dan personel perusahaan lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan ataupun formulir kelengkapan perusahaan, tetapi lebih ditekankan pada orang atau pihak yang berperan pada berbagai tingkatan dalam suatu perusahaan.

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada dewan direksi dan manajemen perusahaan dalam hal penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi perusahaan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan dan perlunya dalam memberikan pertimbangan mengenai biaya dan manfaat relatif dari setiap pengendalian yang dilaksanakan,

Sistem pengendalian intern adalah suatu alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan menggolongkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem organisasi agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan manajemen perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem pengendalian intern yang lemah dapat mengakibatkan kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak bisa dipatuhi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi diatas adalah bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang tidak terpisah yang dijalankan oleh semua pihak yang ada didalam organisasi tersebut sehinggakan tujuan akhir suatu perusahaan yang telah ditetpkan bersama dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Komponen pengendalian intern menurut Boynton (2006:392). Laporan COSO mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian (*control activity*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*monitoring*) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.

Ada empat tujuan sistem pengendalian intern Warren et al (2006: 236) yang memberikan jaminan yang wajar, antara lain:

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketisakefisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan

2. Informasi bersifat akurat

Keandalan data atau informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi.

3. Mendorong efisiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

4. Kegiatan perusahaan sejalan dengan prosedur yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

2.1.2. Proses Pengendalian Intern

Proses pengendalian intern sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Pengertian proses pengendalian intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009: 107) ada beberapa tahapan, antara lain:

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

2. Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

2.1.3. Tujuan Pengendalian Intern dan Penggolongannya

1. Penggolongan Intern

Ditinjau dari tujuan sistem pengendalian intern maka, kita dapat menggolongkan sistem pengendalian intern tersebut menjadi dua macam, yaitu:

1) Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern akuntansi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009: 222), pengendalian intern akuntansi, meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa:

1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
2. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggung jawaban atas harta perusahaan.
3. Penguasaan aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
4. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.

2) Pengendalian Intern Administratif

Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian administratif

dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Misalnya adalah pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan

2. Prosedur Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

Laporan COSO (Boynton, 2006:392) menyatakan pemahaman sistem pengendalian intern mencakup hal-hal berikut ini :

1. Memahami lingkungan pengendalian

Menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan pengendalian yang mencukupi untuk memahami sikap dan tindakan manajemen serta dewan direksi berkenaan dengan lingkungan pengendalian , dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampak kolektif pada pengendalian lain.

2. Memahami penilaian risiko

Menyatakan bahwa auditor harus menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar.

3. Memahami informasi dan komunikasi

Mengindikasikan bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan yang mencukupi mengenai sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan.

4. Memahami aktivitas pengendalian

Menunjukkan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit.

5. Memahami pemantauan

Memahami pemantauan adalah penting untuk memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh entitas, manajemen puncak, manajemen akuntansi, dan auditor internal untuk memantau efektivitas pengendalian intern dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

2.1.4. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : (Boynton, 2006:412)

1. Pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas (struktur organisasi)

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip yang harus dipisahkan yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan semua transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan sistem otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

b. Semua fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan asset perusahaan.

3. Praktik yang sehat

Cara-cara yang umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut yang bercetak, pemeriksaan mendadak, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan oleh satu orang atau satu bagian tanpa campur tangan bagian lain dari awal sampai akhir perputaran jabatan, keharusan pengambilan cuti, pencocokan kekayaan dengan catatannya secara periodik dan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Hal ini akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan karena pemilihan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang memadai dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam hal biaya dan

manfaat. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berikut cara-cara yang baik untuk digunakan :

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipilihnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.1.5. Pengendalian Sistem Informasi Berbasis Komputer

Pengendalian sistem informasi berbasis komputer yang dapat diterapkan oleh perusahaan antara lain : (Boynton, 2006:423)

1. Pengendalian umum

Pengendalian umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai yang direncanakan. Pengendalian ini mencakup

1) Penyusunan rencana pengamanan

Penyusunan ini dilakukan dengan merencanakan pengguna informasi, subsistem informasi, informasi yang dapat digunakan untuk menentukan risiko dan cara pengamanannya.

2) Pemisahan tugas dalam fungsi sistem

Tujuan diadakannya pemisahan tugas dan fungsi sistem adalah untuk membatasi akses agar tidak terjadi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.

3) Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi

Penggunaan pengendalian ini dapat mengurangi secara signifikan potensi pembengkakan biaya dan kegagalan proyek yang menyebabkan pemborosan.

4) Pengendalian akses fisik dan akses logis

Kemampuan untuk menggunakan peralatan komputer disebut dengan akses fisik sedangkan kemampuan untuk memperoleh akses data perusahaan disebut akses logis. Para pengguna hanya diijinkan mengakses data yang dipercayakan kepada masing-masing pengguna untuk dipakai dan hanya mengoperasikan program sesuai jenis pengoperasian yang telah ditentukan.

5) Pengendalian penyimpanan data

Perusahaan perlu melakukan upaya pengamanan data, menjaga *file record*, dan dokumen yang bersifat rahasia dan menerapkan jejak audit untuk menelusur penggunaan data yang bersifat rahasia.

6) Pengawasan transmisi data

Pengawasan transmisi data digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data. Perusahaan harus memantau jaringan untuk mendeteksi titik lemah, memelihara cadangan komponen, dan merancang

jaringan sehingga kapasitas yang tersedia cukup untuk menangani periode pemrosesan data.

7) Perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara pembatasan akses dan melindungi *file* dengan *password*, meminimumkan potensi kecurian, membuat cadangan data secara reguler, meminimumkan risiko virus computer dan melarang penggandaan *file* ke *disk* pribadi.

2. Pengendalian aplikasi

Tujuan diadakannya pengendalian aplikasi adalah menjamin akurasi dan validasi *input*, *file*, program dan *output* sebuah aplikasi. Pengendalian aplikasi meliputi :

1) Pengendalian *input*

Pengendalian input terdiri dari pengendalian sumber data validasi input. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain *key verification*, *check digit verification*, dokumen berurut tercetak, otorisasi, dan pembentukan pengawas data.

2) Pengendalian proses

Pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan dokumen yang mencakup kemutakhiran data, pencocokan data dan pelaporan kesalahan.

3) Pengendalian *output*

Pengendalian dilaksanakan oleh fungsi pengawas data yang akan memeriksa ulang seluruh *output* untuk menjamin kelayakan, ketepatan format *output* dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan *output*.

2.2. Sistem Penerimaan Kas

Warens Reeve Fees (2006) mendefinisikan kas yaitu meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan beberapa definisi mengenai kas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kas meliputi uang dalam bentuk tunai, cek, atau giro yang digunakan sebagai alat tukar untuk pembayaran secara finansial.

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah kumpulan dari sub sistem yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengolah semua transaksi penerimaan kas, baik itu dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang dagang yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas adalah suatu susunan yang di dalamnya meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga penerimaan saldo di dalam kas.

Menurut Slamet Sugiri (2005:16) prinsip-prinsip pengendalian intern yang diterapkan untuk kas antara lain sebagai berikut :

1. Pemisahan tugas

Tugas untuk mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dipisahkan dari tugas menyimpan kas dan menyetujui pengeluaran kas.

2. Penyetoran ke bank

Semua penerimaan kas harus segera disetorkan ke bank dalam rekening giro perusahaan.

3. Pemeriksaan mendadak

Pemeriksaan terhadap catatan dan fisik kas harus dilakukan secara mendadak dan tidak dalam interval waktu tertentu.

4. Penggunaan cek

Semua pengeluaran kas (kecuali pengeluaran kas kecil) harus dilakukan dengan menggunakan cek

Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi didalam penerimaan kas adalah :

1. Lapping, yaitu menyelewengkan kas dengan cara melaporkan penerimaan lebih lambat daripada saat penerimaannya, perkiraan debitur baru akan dicatat setelah mendapatkam penerimaan dari debitur yang lain.
2. Menggunakan dana untuk sementara waktu tanpa memalsukan catatan atau pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang yang telah diterima.
3. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atas pengeluaran atau lebih kecil atas penerimaan daripada jumlah yang sebenarnya.
4. Terlalu tinggi membukukan potongan harga
5. Menghapuskan piutang sebagai piutang tak tertagih.